

BAB I

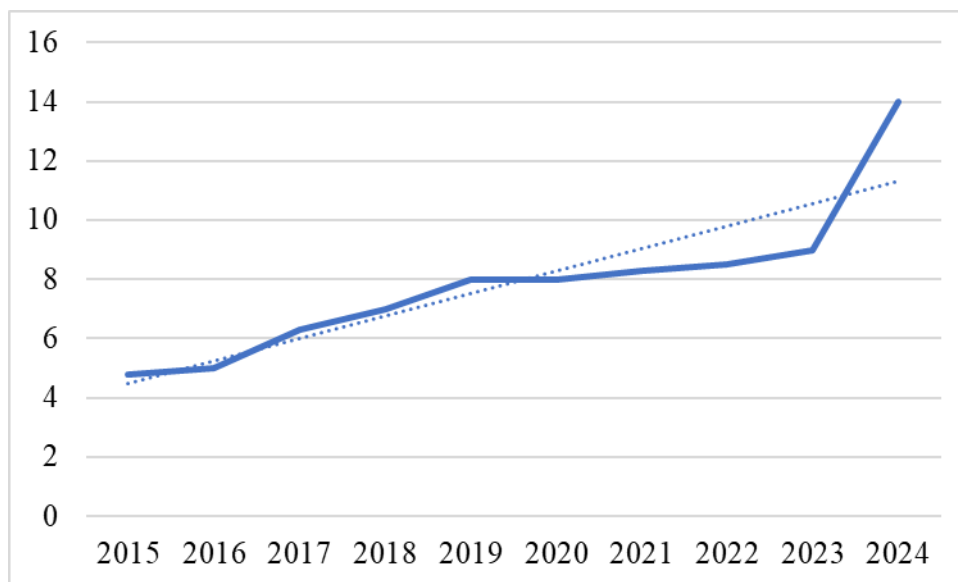
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan banyak ditemukan pada daerah pesisir yakni sampah dari sisa aktivitas masyarakat di darat yang ikut terbawa ke laut sampai ke pinggiran pantai. Permasalahan sampah pesisir dan laut telah menjadi isu lingkungan yang semakin mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir, dengan fluktuasi yang signifikan baik dalam volume maupun dampaknya (Nurhidayah et al., 2022; Wynne et al., 2018). Berdasarkan data dari *United Nations Environment Programme* (UNEP) pada 2020, diperkirakan lebih dari 8 juta ton sampah plastik setiap tahun masuk ke lautan, sebagian besar berasal dari aktivitas manusia di darat yang terbawa oleh aliran sungai dan saluran drainase (Rahmasary et al., 2021; Wirawan et al., 2018; Zhuang et al., 2008). Indonesia, sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, berkontribusi signifikan terhadap masalah ini, dengan sekitar 3,2 juta ton sampah plastik diperkirakan berakhir di laut setiap tahun, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain itu, data dari penelitian Bali Waste Management Study pada 2019 menunjukkan bahwa 40% sampah di pesisir Bali berasal dari sampah darat, dengan fluktuasi yang lebih tinggi terjadi selama musim liburan, mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pengelolaan sampah.

Sampah pesisir ini tidak hanya menjadi masalah kebersihan, tetapi juga merusak ekosistem laut. *Ocean Conservancy* melaporkan pada 2022 bahwa 80

persen sampah laut berasal dari darat, yang dibawa ke laut melalui sungai dan drainase kota pesisir. Ini menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan sampah di daratan untuk mengurangi dampaknya pada lingkungan laut (Li et al., 2023). Tidak hanya itu, fluktuasi sampah yang meningkat secara signifikan setiap tahun, terutama pada musim hujan dan pasca musim liburan, memperburuk situasi. Penelitian dalam periode 2018-2022 menunjukkan peningkatan hingga 50 persen sampah di beberapa titik pengamatan selama periode tersebut. Kerusakan akibat sampah ini juga terlihat pada ekosistem terumbu karang di Indonesia, yang dilaporkan mengalami kerusakan hingga 50 persen akibat sampah plastik yang menumpuk di perairan pesisir. Kerusakan ekosistem laut ini berpotensi mengancam kehidupan laut yang bergantung pada kondisi tersebut, serta kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut.



Gambar 1. 1. Jumlah Sampah Laut (Juta Ton)

Sumber: Ocean Conseqvancy (2024) & UNEP (2024)

Berdasarkan grafik (lihat Gambar 1.1) yang menunjukkan tren jumlah sampah laut dari tahun 2015 hingga 2024, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam volume sampah yang masuk ke lautan. Pada periode 2015 hingga 2019, jumlah sampah laut meningkat secara perlahan, dimulai dari sekitar 4 juta ton pada tahun 2015 dan mencapai 6 juta ton pada tahun 2019. Peningkatan ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah sampah laut bertambah, tingkat pertumbuhannya masih dalam batas yang dapat dikelola (Akber et al., 2020; Hidayat & Agusliani, 2020). Namun, mulai tahun 2020, terjadi lonjakan tajam pada grafik, dengan jumlah sampah laut yang meningkat drastis. Kenaikan tajam ini kemungkinan besar disebabkan oleh faktor-faktor seperti pandemi COVID-19 yang meningkatkan penggunaan plastik sekali pakai, seperti masker, sarung tangan, dan kemasan sekali pakai, serta gangguan pada sistem pengelolaan sampah yang memperburuk kondisi ini.

Memasuki periode 2022 hingga 2024, jumlah sampah laut terus meningkat pesat, mencapai puncaknya sekitar 14 juta ton pada tahun 2024. Peningkatan tajam ini kemungkinan disebabkan oleh faktor-faktor seperti urbanisasi yang semakin pesat, ketergantungan yang tinggi pada material plastik, dan masih lemahnya sistem pengelolaan sampah di banyak negara. Meskipun ada upaya untuk mengurangi sampah plastik, konsumsi plastik global yang terus meningkat dan rendahnya tingkat daur ulang masih menjadi tantangan besar.

Permasalahan sampah sudah seharusnya menjadi perhatian khusus secara keseluruhan oleh setiap negara. Sampah laut, terutama plastik, telah menjadi ancaman besar bagi ekosistem laut, kesehatan manusia, dan perekonomian global.

Sampah yang terbawa ke laut dari daratan dapat menyebar ke seluruh dunia melalui arus laut, menjadikan masalah ini sebagai isu lintas negara yang memerlukan kerjasama internasional untuk penanganannya.

Pertama-tama, dampak lingkungan dari sampah laut sangat serius. Plastik yang dibuang ke laut membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan selama itu dapat merusak kehidupan laut, termasuk terumbu karang, ikan, dan mamalia laut. Sampah yang terurai menjadi mikroplastik dapat masuk ke dalam rantai makanan laut dan akhirnya sampai ke konsumen manusia, menimbulkan potensi risiko kesehatan yang serius. Dengan sampah laut yang semakin meningkat setiap tahunnya, ancaman terhadap keberlanjutan ekosistem laut semakin besar.

Selain itu, masalah sampah laut juga berdampak pada perekonomian global. Banyak negara bergantung pada sektor perikanan dan pariwisata yang langsung terpengaruh oleh pencemaran laut. Kerusakan pada ekosistem laut dapat mengurangi hasil tangkapan ikan dan mengurangi daya tarik wisatawan ke destinasi pesisir, yang pada gilirannya merugikan perekonomian negara-negara tersebut. Selain itu, biaya pembersihan sampah laut yang terus meningkat membebani anggaran pemerintah, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur lainnya.

Masalah sampah laut juga menjadi isu sosial yang membutuhkan peran aktif masyarakat di seluruh dunia. Masyarakat di pesisir dan negara-negara dengan populasi besar harus diberi edukasi tentang pengelolaan sampah yang lebih baik, termasuk pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, daur ulang, dan pembuangan sampah yang benar. Namun, hal ini tidak dapat diselesaikan hanya

dengan kesadaran masyarakat. Pemerintah, industri, dan organisasi internasional harus bekerja sama untuk mengimplementasikan kebijakan yang lebih ketat, seperti pengurangan produksi plastik, peningkatan teknologi daur ulang, serta penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah yang efisien.

Di negara maju, meskipun infrastruktur pengelolaan sampah umumnya lebih baik, sampah laut tetap menjadi masalah yang signifikan. Negara-negara ini menghasilkan volume sampah plastik yang tinggi, yang sebagian besar berasal dari konsumsi plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun banyak negara maju telah meningkatkan kesadaran tentang daur ulang, sekitar 80 persen dari sampah laut yang ditemukan di seluruh dunia berasal dari daratan (Jambeck et al., 2015). Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jepang, dengan tingkat konsumsi plastik yang tinggi, menyumbang volume sampah laut yang besar. Di Amerika Serikat, misalnya, meskipun ada kebijakan pengelolaan sampah yang ketat, banyak sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik dan berakhir di laut melalui aliran sungai, kanal, dan drainase (Marine Conservation, 2021).

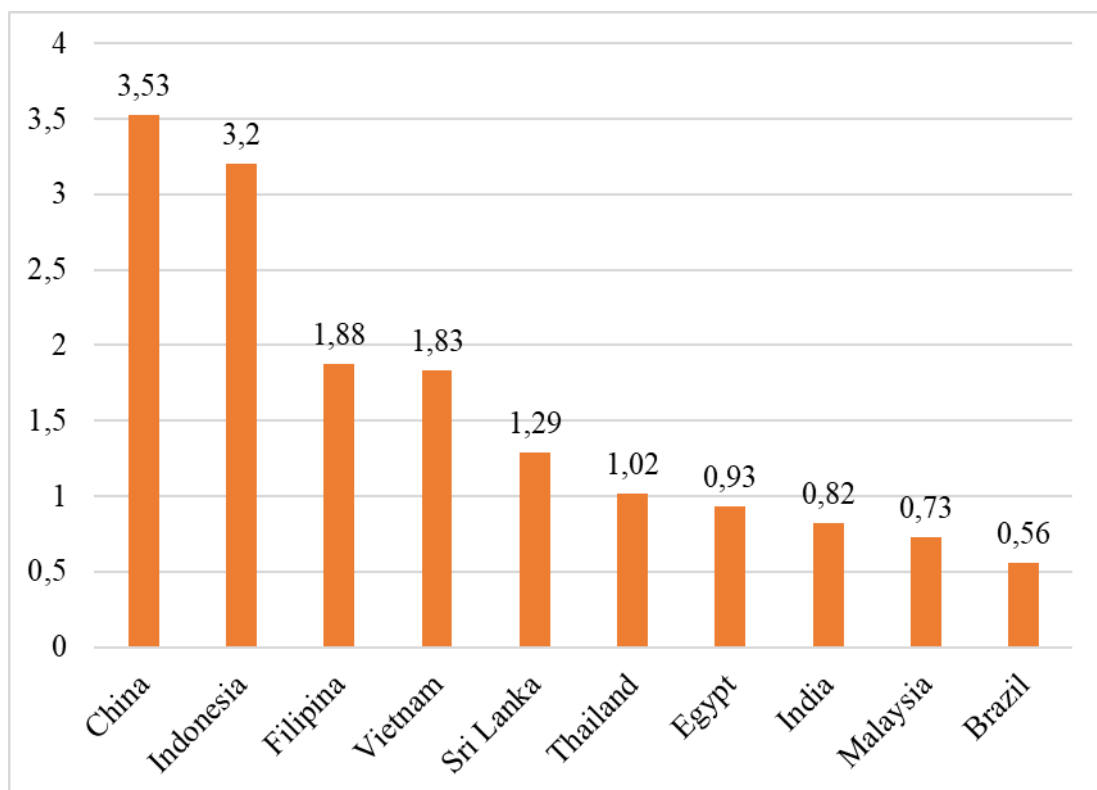
Selain itu, negara maju menghadapi tantangan terkait dengan kebijakan pengelolaan sampah yang seringkali tidak konsisten antar daerah atau wilayah. Beberapa daerah mungkin memiliki sistem pengelolaan yang sangat efisien, sementara yang lain tidak. Hal ini menyebabkan sampah yang terbuang tidak hanya merusak ekosistem laut tetapi juga berkontribusi pada meningkatnya polusi mikroplastik di samudra. Pencemaran mikroplastik ini sangat berbahaya, karena dapat masuk ke dalam rantai makanan dan menyebabkan dampak jangka panjang bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.

Disisi lain, di negara berkembang, masalah sampah laut lebih kompleks karena terbatasnya infrastruktur pengelolaan sampah dan tantangan sosial-ekonomi. Negara-negara ini seringkali tidak memiliki sistem pengelolaan sampah yang efektif, yang menyebabkan sampah rumah tangga, industri, dan sampah dari sektor pariwisata sering kali dibuang sembarangan di pantai atau dibuang ke dalam sungai yang akhirnya membawa sampah ke laut (UNEP, 2018). Negara-negara seperti Indonesia, Filipina, dan India, yang memiliki populasi besar dan kesulitan dalam pengelolaan sampah, merupakan penyumbang utama sampah plastik di laut global (Jambeck et al., 2015). Dalam banyak kasus, masyarakat di negara-negara berkembang kurang memiliki akses terhadap fasilitas daur ulang yang memadai, sehingga menyebabkan penumpukan sampah di sepanjang pantai dan di sungai yang mengalir ke laut.

Di sisi lain, pariwisata di negara berkembang sering kali meningkatkan volume sampah di pesisir. Banyak destinasi wisata di kawasan tropis yang mengalami peningkatan tajam dalam jumlah sampah plastik selama musim liburan, di mana sampah dari kegiatan wisatawan terbuang tanpa dikelola dengan baik. Ini memperburuk pencemaran laut, yang mengancam kehidupan laut dan industri perikanan lokal (K. C. M. Wang et al., 2021; Xu et al., 2023). Masalah sampah laut di negara maju dan berkembang juga mempengaruhi sektor ekonomi yang bergantung pada ekosistem laut. Di negara maju, meskipun sektor perikanan mungkin tidak sepenting di negara berkembang, industri pariwisata, terutama di daerah pesisir, sangat terpengaruh oleh kualitas air dan kebersihan pantai.

Pencemaran pantai mengurangi daya tarik wisata, yang berdampak pada pendapatan dari sektor pariwisata.

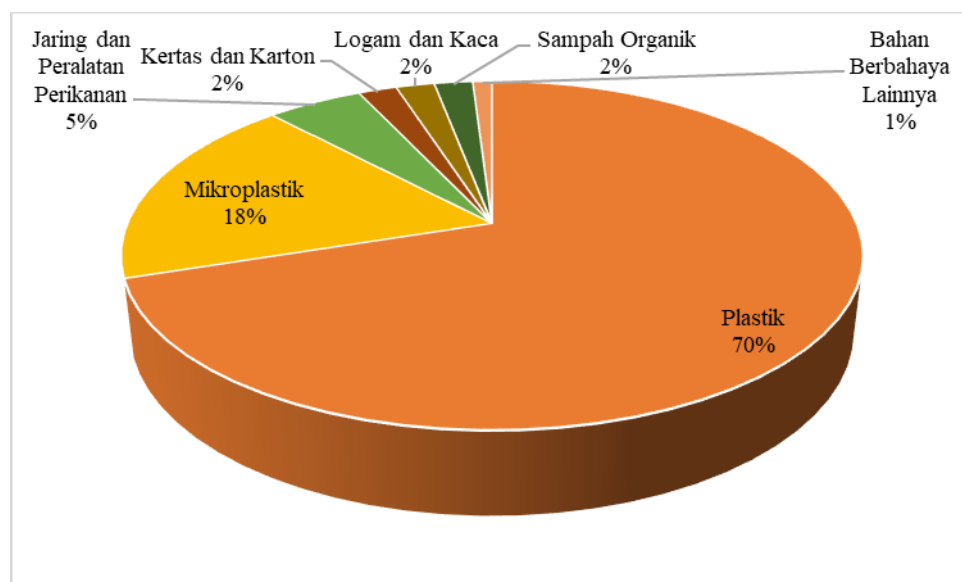
Di negara berkembang, dampak sampah laut terhadap perikanan sangat besar. Sampah plastik yang menumpuk di laut menghalangi pergerakan dan reproduksi ikan, serta merusak terumbu karang yang menjadi tempat hidup banyak spesies laut. Industri perikanan lokal di negara-negara berkembang seringkali mengalami kerugian akibat penurunan stok ikan, yang pada gilirannya mengancam mata pencaharian nelayan tradisional dan perekonomian lokal yang bergantung pada sektor tersebut.



Gambar 1. 2. Estimasi Jumlah Sampah Laut (Juta Ton/Tahun)

Sumber: United Nations Environment Programme (2024)

Sampah plastik telah menjadi masalah lingkungan yang dominan di lautan dunia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jambeck et al. (2015), plastik menyumbang lebih dari 60-80 persen dari total sampah yang ada di lautan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan plastik yang sangat luas di seluruh dunia, terutama plastik sekali pakai yang sulit terurai secara alami. Plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terdegradasi, sementara volume produksinya terus meningkat. Peningkatan jumlah plastik yang digunakan dalam kemasan, barang sehari-hari, dan produk industri semakin memperburuk masalah ini. Setiap tahun, diperkirakan lebih dari 8 juta ton plastik masuk ke lautan, sebagian besar berasal dari kegiatan manusia di daratan yang tidak dikelola dengan baik (Jambeck et al., 2015).



Gambar 1. 3. Komposisi Sampah Laut

Sumber: *United Nations Environment Programme (2024)*

Plastik yang terbangun ke laut beragam dalam bentuknya, mulai dari botol, kantong plastik, wadah makanan, hingga sedotan. Sampah-sampah ini sering kali terbawa oleh aliran sungai, saluran drainase, dan kegiatan pesisir ke laut. Plastik yang terbangun ke laut ini tidak hanya mencemari air tetapi juga mengancam kehidupan laut. Banyak organisme laut, termasuk ikan, penyu, dan burung laut, yang menganggap plastik sebagai makanan, mengakibatkan mereka tertelan atau terjatuh plastik. Plastik yang terurai menjadi mikroplastik, yang sering kali tidak terlihat oleh mata manusia, dapat memasuki rantai makanan laut dan pada akhirnya sampai ke manusia (Rochman et al., 2013). Fenomena ini diperburuk dengan rendahnya tingkat daur ulang plastik di banyak negara, baik negara maju maupun berkembang. Sebagian besar plastik yang dibuang ke laut tidak dapat didaur ulang atau diolah kembali, yang menjadikan sampah plastik sebagai polutan permanen di ekosistem laut. Meskipun upaya untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan meningkatkan kesadaran masyarakat telah dilakukan, namun konsumsi plastik global tetap meningkat, yang memperburuk pencemaran laut.

Merujuk pada Gambar 1.2, Indonesia merupakan salah satu negara yang menyumbang jumlah sampah laut terbesar setelah China. Sebagai salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di Dunia, Indonesia menyumbang sekitar 3,2 juta ton sampah plastik ke lautan setiap tahun, menjadikannya salah satu penyumbang terbesar sampah laut di dunia (Jambeck et al., 2015). Masalah ini terutama dipicu oleh meningkatnya penggunaan plastik sekali pakai, yang tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga mengancam ekosistem laut dan kesehatan masyarakat. Indonesia, dengan kekayaan biodiversitas laut yang tinggi,

menghadapi ancaman besar terhadap ekosistemnya akibat pencemaran plastik. Sampah plastik yang dibuang ke laut, baik itu berupa botol, kantong plastik, sedotan, atau jaring perikanan yang ditinggalkan, mengganggu kehidupan laut. Banyak spesies laut, seperti penyu, ikan, dan burung laut, sering kali tertelan atau terjatoh oleh sampah plastik. Penyu, misalnya, sering kali mengira kantong plastik sebagai ubur-ubur, yang merupakan makanan utama mereka, sehingga mengakibatkan mereka mati akibat tersedak atau terluka (Wilcox et al., 2015).

Selain itu, sampah plastik yang lebih besar akan terurai menjadi mikroplastik, partikel-partikel kecil yang sering kali tidak terlihat oleh mata manusia tetapi sangat berbahaya bagi organisme laut. Mikroplastik dapat memasuki rantai makanan laut, yang pada akhirnya dapat mengancam kesehatan manusia yang mengonsumsi ikan dan makanan laut yang terkontaminasi mikroplastik. Hal ini menambah kekhawatiran tentang dampak jangka panjang dari pencemaran plastik terhadap kesehatan manusia (Rochman et al., 2013).

Sampah laut juga membawa dampak yang signifikan terhadap ekonomi Indonesia, terutama sektor perikanan dan pariwisata. Indonesia adalah negara dengan salah satu industri perikanan terbesar di dunia, dan pencemaran laut oleh sampah plastik dapat mengurangi hasil tangkapan ikan. Sampah plastik yang mengganggu terumbu karang dan habitat laut lainnya mengancam kelangsungan hidup berbagai spesies ikan yang penting bagi sektor perikanan. Kerusakan ekosistem laut ini berdampak pada penurunan hasil tangkapan ikan, yang pada gilirannya merugikan para nelayan dan industri perikanan yang bergantung pada sumber daya alam tersebut.

Sektor pariwisata Indonesia, terutama yang berkaitan dengan destinasi pesisir dan pantai, juga terancam oleh pencemaran laut. Sampah yang mengotori pantai mengurangi daya tarik wisata, yang berdampak pada pendapatan dari pariwisata. Pantai yang kotor dan tercemar oleh sampah laut dapat mengurangi minat wisatawan domestik dan internasional untuk mengunjungi destinasi pesisir di Indonesia, yang mengakibatkan kerugian ekonomi bagi masyarakat lokal yang bergantung pada industri pariwisata (Sugiarto et al., 2017).

Masalah sampah laut di Indonesia juga diperburuk oleh pengelolaan sampah yang kurang efektif. Meskipun Indonesia telah memiliki kebijakan dan program pengelolaan sampah, termasuk "Gerakan Nasional Sadar Sampah" dan komitmen untuk mengurangi sampah plastik pada tahun 2025, pelaksanaan di tingkat lokal sering kali terhambat oleh keterbatasan infrastruktur dan kurangnya kesadaran masyarakat. Banyak daerah di Indonesia, terutama di kawasan pesisir, masih kekurangan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Sampah yang tidak dikelola dengan baik sering dibuang sembarangan di sungai atau pantai, yang akhirnya terbawa ke laut (UNEP, 2018).

Batam, sebagai salah satu kota industri terbesar di Indonesia yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, menghadapi masalah sampah laut yang semakin mengkhawatirkan. Kota ini memiliki kawasan pesisir yang luas dan berdekatan dengan Selat Malaka, yang menjadi jalur pelayaran internasional. Peningkatan aktivitas industri, pariwisata, serta urbanisasi yang pesat berkontribusi pada peningkatan sampah laut, terutama sampah plastik. Hal ini menambah tantangan dalam pengelolaan sampah dan keberlanjutan lingkungan laut di Batam.

Sebagai kawasan industri yang berkembang pesat, Batam menghasilkan banyak sampah, termasuk sampah plastik yang berasal dari aktivitas rumah tangga, perkantoran, dan industri. Industri manufaktur, seperti elektronik dan tekstil, juga berkontribusi terhadap limbah yang dibuang ke laut. Selain itu, kawasan pesisir Batam yang berkembang pesat sebagai destinasi wisata juga menghasilkan sampah plastik dari kegiatan pariwisata dan perhotelan. Sampah dari restoran, hotel, dan kegiatan wisata lainnya seringkali dibuang sembarangan atau tidak dikelola dengan baik.

Pengelolaan sampah laut di Batam telah menjadi isu yang semakin mendesak mengingat kota ini memiliki garis pantai yang luas dan menjadi salah satu pusat industri serta pariwisata di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Batam telah menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran laut. Salah satunya adalah , Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, yang mencakup pengurangan, pemilahan, dan daur ulang sampah, termasuk plastik yang sering kali menjadi sampah dominan di laut. Dalam kerangka ini, masyarakat diwajibkan untuk memilah sampah dan diberikan penyuluhan mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik, terutama dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Selain itu, Batam juga mengimplementasikan Program Gerakan Nasional Sadar Sampah, yang mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap pengurangan sampah plastik dan menerapkan kebijakan tanpa plastik sekali pakai di sektor pariwisata dan perhotelan.

Pemerintah Batam juga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengelolaan sampah, seperti sistem pemantauan sampah laut yang berbasis satelit dan teknologi pengolahan sampah plastik menjadi produk berguna. Untuk mendukung kebijakan ini, sektor pariwisata Batam turut dilibatkan dengan pemberlakuan kebijakan pengurangan penggunaan plastik di hotel, restoran, dan tempat wisata, serta kampanye pariwisata berkelanjutan yang mengedukasi wisatawan dan pelaku industri mengenai pentingnya menjaga kebersihan laut. Selain itu, Batam juga melaksanakan program pembersihan sampah laut yang melibatkan masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah, dengan fokus pada area pesisir yang rentan terhadap akumulasi sampah plastik.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Masalah Sampah Laut, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi elemen kunci dalam implementasi peraturan ini, terutama di Batam. Sebagai kota industri dan pariwisata, peran sektor swasta sangat dibutuhkan untuk mendukung upaya pengurangan sampah laut. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 menekankan pentingnya keterlibatan aktif dari berbagai pihak, terutama sektor swasta, yang memiliki peran penting dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat serta memperbaiki pengelolaan sampah. Sektor swasta dapat berperan dalam kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye pengurangan sampah plastik dan promosi penggunaan bahan ramah lingkungan. Misalnya, perusahaan-perusahaan besar di Batam, seperti yang bergerak di bidang pariwisata, manufaktur, dan retail, dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk

mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta memanfaatkan sistem daur ulang yang ada.

Selain itu, sektor swasta dapat mendukung gerakan-gerakan bersih-bersih pantai dan laut, seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan di Batam dalam kolaborasi dengan komunitas lokal. Gerakan ini dapat melibatkan karyawan perusahaan, masyarakat pesisir, dan para wisatawan untuk secara bersama-sama membersihkan sampah di sepanjang pantai dan perairan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan laut. Perusahaan juga dapat berinvestasi dalam teknologi pengelolaan sampah yang lebih efisien, seperti teknologi untuk mengolah sampah plastik menjadi bahan yang dapat dimanfaatkan kembali atau energi terbarukan, yang akan mengurangi volume sampah yang dibuang ke laut.

Salah satu perusahaan di Kota Batam yang aktif terlibat dalam permasalahan sampah laut adalah PT. BatamOn Global Group. PT BatamOn Global Group dapat memainkan peran kunci dalam mendukung implementasi Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018. Salah satu upaya yang dilakukan oleh PT BatamOn Global Group dalam mengatasi masalah sampah laut di Batam adalah melalui Program Tanjung Uma Empowerment, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pesisir, mengurangi sampah plastik, serta meningkatkan kesadaran lingkungan. Program ini sejalan dengan tujuan global untuk mengurangi pencemaran plastik di laut, seiring dengan komitmen Indonesia yang turut mendukung Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia.

Sebagai perusahaan yang mendukung keberlanjutan lingkungan, PT BatamOn Global Group telah menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi internasional, termasuk *United Nations* (PBB), dalam rangka mendukung inisiatif global untuk mengatasi masalah sampah laut. PBB, melalui berbagai lembaga dan programnya, telah mengadvokasi pentingnya pengelolaan sampah laut sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan global. Salah satu program utama yang dipromosikan oleh PBB adalah *Sustainable Development Goal (SDG) 14: Life Below Water*, yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran laut dan melindungi ekosistem laut untuk keberlanjutan masa depan. PT BatamOn Global Group, dalam menjalankan Program Tanjung Uma Empowerment, berkolaborasi dengan berbagai lembaga yang berafiliasi dengan PBB untuk mendukung pengurangan sampah plastik, pelestarian ekosistem laut, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sampah secara berkelanjutan.

Implementasi Program Tanjung Uma Empowerment yang dijalankan oleh PT BatamOn Global Group dalam menangani masalah sampah laut di Batam menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya infrastruktur pengelolaan sampah yang efisien, terutama di kawasan pesisir Tanjung Uma. Meskipun PT BatamOn Global Group telah berupaya membangun fasilitas daur ulang dan meningkatkan sistem pengelolaan sampah, banyak wilayah yang masih kekurangan fasilitas pemilahan sampah yang memadai, yang menghambat proses pengurangan sampah yang berakhir di laut. Selain itu, kesadaran masyarakat yang masih rendah terkait pentingnya pengelolaan sampah yang benar menjadi tantangan besar. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya

memahami dampak sampah plastik terhadap lingkungan laut, sehingga partisipasi mereka dalam kegiatan pemilahan sampah dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai masih terbatas. Selain itu, program ini juga menghadapi tantangan mengenai kurangnya koordinasi yang optimal antara berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta.

Penelitian mengenai implementasi Tanjung Uma Empowerment menjadi sangat urgen karena dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana program ini berhasil mengatasi masalah sampah laut dan dampaknya terhadap masyarakat pesisir di Batam. Penelitian ini penting untuk menganalisis strategi yang digunakan pada program dalam mengurangi volume sampah plastik yang mencemari laut serta memberikan dampak positif pada pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam kolaborasi antara pihak swasta, pemerintah, dan masyarakat yang dapat mempengaruhi kesuksesan program ini. Hasil penelitian akan memberikan rekomendasi yang berguna untuk memperbaiki kebijakan pengelolaan sampah di Batam, serta meningkatkan kolaborasi antar pihak yang terlibat, sehingga masalah sampah laut dapat ditangani secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting bagi Batam, tetapi juga dapat dijadikan model bagi kota-kota pesisir lainnya di Indonesia dalam mengatasi masalah sampah laut dan pelestarian lingkungan.

1.2. Identifikasi Masalah

Masalah sampah laut di Batam menjadi isu lingkungan yang semakin mendesak dan kompleks, mengingat posisi geografis Batam yang terletak di

wilayah pesisir dengan aktivitas industri dan pariwisata yang terus berkembang. Kota ini, yang memiliki garis pantai panjang dan menjadi salah satu pusat industri di Indonesia, menghadapi peningkatan jumlah sampah yang masuk ke laut, terutama sampah plastik. Peningkatan aktivitas ekonomi di Batam, yang melibatkan banyak sektor, seperti perikanan, pariwisata, dan manufaktur, berkontribusi pada peningkatan volume sampah yang dihasilkan. Namun, pengelolaan sampah yang terbatas, kurangnya fasilitas daur ulang, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan benar, menyebabkan sebagian besar sampah ini berakhir di laut. Dampak dari pencemaran sampah laut ini tidak hanya merusak ekosistem laut dan pesisir, tetapi juga mengancam sektor perikanan dan pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal Batam.

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018, yang bertujuan untuk mengurangi sampah laut di Indonesia, menjadi sangat relevan untuk Batam, namun tantangan dalam penerapannya di kota ini cukup besar. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, terutama di kawasan pesisir dan daerah dengan aktivitas industri yang tinggi. Selain itu, kesadaran masyarakat yang rendah mengenai dampak sampah plastik terhadap lingkungan laut menghambat upaya pengurangan sampah yang berakhir di laut. Meskipun sudah ada kebijakan untuk mengatasi masalah ini, kolaborasi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat masih terbatas. Penelitian ini menjadi sangat urgen untuk dilakukan karena dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana Peraturan Presiden No. 83

Tahun 2018 diimplementasikan di Batam, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah laut. Hasil penelitian ini akan memberikan rekomendasi yang penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, memperkuat kolaborasi antara pihak terkait, dan memastikan keberlanjutan upaya pengurangan sampah laut di Batam, yang pada gilirannya akan mendukung kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi daerah.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah terkait permasalahan sampah laut di Kota Batam, maka penulis memformulasikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini akan merangkum analisis terkait Strategi Implementasi Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 terkait pengurangan sampah laut oleh PT BatamOn Global Group.
2. Penelitian ini akan menganalisis terkait kendala yang dialami oleh PT BatamOn Global Group dalam melaksanakan Program Tanjung Uma Empowerment.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah terkait dengan permasalahan sampah laut di Batam, berikut adalah dua rumusan masalah yang dapat digunakan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh PT BatamOn Global Group dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 terkait pengelolaan sampah laut di Kota Batam?

2. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi oleh PT BatamOn Global Group dalam melaksanakan strategi pengelolaan sampah laut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 di Kota Batam?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, berikut adalah dua rumusan masalah yang dapat digunakan dalam penelitian ini:

1. Untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh PT BatamOn Global Group dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 terkait pengelolaan sampah laut di Kota Batam.
2. Untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi oleh PT BatamOn Global Group dalam melaksanakan strategi pengelolaan sampah laut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 di Kota Batam.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini antara lain, bagi PT BatamOn Global Group, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan evaluasi terhadap strategi yang diterapkan oleh perusahaan dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 terkait pengelolaan sampah laut di Batam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan efektivitas program CSR perusahaan, serta membantu mengatasi tantangan yang dihadapi dalam menjalankan kebijakan tersebut. Bagi Pemerintah Kota Batam, penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna dalam menilai sejauh

mana implementasi kebijakan pengelolaan sampah laut dapat diterapkan secara efektif dan memberikan masukan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dan terkoordinasi antara sektor swasta dan pemerintah. Selain itu, bagi masyarakat Batam, penelitian ini berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah laut dan mendorong partisipasi aktif dalam mendukung pengurangan sampah plastik yang mencemari lingkungan laut.

1.6.2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian pengelolaan sampah laut dan peran sektor swasta dalam mencapai tujuan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai strategi pengelolaan sampah di daerah pesisir yang berkembang pesat seperti Batam, serta memberikan pandangan baru tentang tantangan dan solusi yang relevan.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran sektor swasta dalam mendukung kebijakan lingkungan yang lebih luas, seperti Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi pengembangan kebijakan pengelolaan sampah di daerah pesisir, serta memberikan dasar bagi kebijakan publik yang lebih baik dalam menghadapi tantangan lingkungan, khususnya di kota-kota pesisir lainnya di Indonesia.